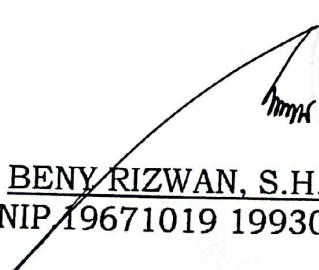


## HASIL PENCERMATAN


### RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMEMUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

- Rapat : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
- Hari/Tanggal : Kamis/19 Desember 2024.
- Jam : 09.00 WIB – Selesai.
- Peserta Rapat : Daftar Hadir Tim Asistensi sesuai daftar hadir terlampir
- Tempat : Ruang Rapat Setda dan Wabup Lt. I. Kab. Pessel
- Hasil Pembahasan : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum dihadiri oleh Inspektorat, BPKPAD, Bagian Hukum, dan Bapedalitbang.  
Bersama penyusun dan peserta rapat lainnya disepakati beberapa hal untuk menjadi bahan perbaikan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, yaitu :
1. Dasar hukum yang dicantumkan dalam konsideran mengingat merupakan dasar hukum yang menjadi kewenangan dalam pembuatan Peraturan daerah dan yang menjadi rujukan atau dasar pembuatan peraturan daerah. Sehingga dasar hukum angka 1 dihapus dan diganti dengan yang terbaru.
  2. Tambahkan pada Dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  3. Subtansi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Kesimpulan Rapat : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Mengetahui,  
(Kepala Bagian Hukum),

  
BENY RIZWAN, S.H., M.Si  
NIP.19671019 199308 1 001

Notulis,  
(Analisis Hukum),

  
SYAHRONI, S.H.  
NIP.19860626 201903 1 001